



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN PENDEKATAN "RULE OF REASON"  
TERHADAP BENTUK PERSEKONGKOLAN TENDER  
DALAM PERKARA PENJUALAN 2 ( DUA ) UNIT  
KAPAL TANKER VLCC PT. PERTAMINA**

**TESIS**

**IQBAL ALBANNA  
NPM. 0706305500**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN PENDEKATAN "RULE OF REASON"  
TERHADAP BENTUK PERSEKONGKOLAN TENDER  
DALAM PERKARA PENJUALAN 2 ( DUA ) UNIT  
KAPAL TANKER VLCC PT. PERTAMINA**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

**IQBAL ALBANNA  
NPM. 0706305500**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JANUARI 2010**

ii



**UNIVERSITY OF INDONESIA**

**THE APPLICATION OF “RULE OF REASON” APPROACH  
TO THE FORM OF BID RIGGING  
IN THE CASE OF SELLING 2 ( TWO ) UNITS OF  
VLCC TANKER SHIPS OF PT. PERTAMINA**

**THESIS**

Presented as one of the requirements to obtain Master Degree of Law

**IQBAL ALBANNA  
NPM. 0706305500**

**FACULTY OF LAW  
MASTER DEGREE OF LAW PROGRAM  
JAKARTA  
JANUARY 2010**

iii

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Iqbal Albanna**

**NPM : 0706305500**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 6 Januari 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Iqbal Albanna  
NPM : 0706305500  
Program Studi : Pasca Sarjana  
Judul Tesis : PENERAPAN PENDEKATAN "RULE OF REASON"  
TERHADAP BENTUK PERSEKONGKOLAN TENDER  
DALAM PERKARA PENJUALAN 2 ( DUA ) UNIT  
KAPAL TANKER VLCC PT. PERTAMINA

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Penguji/Pembimbing :

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D ( )

Penguji/Ketua Sidang :

Andri Gunawan Wibisana, SH., LL.M., Ph.D ( )

Penguji :

Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Januari 2010

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Albanna  
NPM : 0706305500  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi  
Program : Pascasarjana  
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN PENDEKATAN "RULE OF REASON" TERHADAP BENTUK PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERKARA PENJUALAN 2 (DUA) UNIT KAPAL TANKER VLCC PT. PERTAMINA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Januari 2010

**Yang menyatakan,**

( Iqbal Albanna )

## KATA PENGANTAR

Kita di Indonesia telah mengalami pahitnya sistem monopoli dalam perekonomian, yang antara lain menjadi penyebab lahirnya krisis ekonomi yang hampir menenggelamkan kehidupan bangsa. Lahirnya Undang – Undang Anti monopoli di Indonesia bukan karena desakan dari luar, tetapi adalah kehendak masyarakat kita sendiri. Namun harus diakui lahirnya Undang – Undang Anti monopoli tersebut bertambah cepat karena krisis ekonomi dan desakan badan Internasional untuk memulihkan ekonomi Bangsa.

Tambah terintegrasi ekonomi antar negara, tambah dekat peraturan perundang – undangan di bidang ekonomi negara – negara tersebut, tidak terkecuali yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Undang – Undang yang tidak mudah dipahami, karena adanya aspek analisa ekonomi.

Tesis ini mencoba menjelaskan penerapan pendekatan *rule of reason* pada bentuk persekongkolan tender khususnya pada kasus divestasi kapal tanker VLCC PT. Pertamina. Penulis juga mencoba melakukan analisa terhadap beberapa putusan dalam perkara penjualan 2 (dua) unit kapal tanker VLCC, yang menjadi acuan dalam menerapkan pendekatan *rule of reason* tersebut.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D, selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Andri Gunawan Wibisana, SH., LL.M., Ph.D, selaku penguji/Ketua Sidang yang telah memberikan masukannya dalam penyempurnaan tesis ini.

- (3) Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M, selaku penguji yang telah memberikan masukannya dalam penyempurnaan tesis ini serta pengajarannya dalam memberikan perkuliahan selama saya menempuh kuliah di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (4) Kedua orang tua yang menjadi suri tauladan dalam hidup saya.
- (5) Sahabat- sahabat saya yang sangat mendukung dalam penulisan tesis ini, seperti Pak Ifan, Yanwar Malaming, Novi dan Frangky yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.
- (6) Teman - temanku yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.
- (7) Pihak – pihak yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan masukan serta arahan dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 6 Januari 2010

Penulis,

( Iqbal Albanna )



## ABSTRAK

Nama : Iqbal Albanna  
NPM : 0706305500  
Judul Tesis : PENERAPAN PENDEKATAN "RULE OF REASON"  
TERHADAP BENTUK PERSEKONGKOLAN TENDER  
DALAM PERKARA PENJUALAN 2 (DUA) UNIT  
KAPAL TANKER VLCC PT. PERTAMINA

Dalam konteks hukum persaingan usaha untuk menganalisa suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan dua model pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut telah bertentangan dengan hukum persaingan usaha atau tidak. Pendekatan tersebut adalah pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal*.

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi alasan – alasan perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan *per se illegal* adalah suatu pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.

Persekongkolan tender adalah praktek yang dilakukan antara para penawar tender selama proses penawaran, untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat umum, dan proyek lain yang ditawarkan oleh pemerintah, BUMN maupun swasta dengan kerja sama yang dilakukan dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Perkara persekongkolan tender penjualan 2 (dua) unit kapal tanker *Very Large Crude Carrier* (VLCC) milik PT. Pertamina melibatkan 5 (lima) perusahaan sebagai Terlapor I sampai dengan Terlapor V, yaitu PT. Pertamina (Persero) sebagai Terlapor I; Goldman Sachs, Pte (Singapore) sebagai Terlapor II; Frontline, Ltd sebagai Terlapor III; PT. Corfina Mitrakreasi sebagai Terlapor IV; dan PT. Perusahaan Pelayaran Equinox sebagai Terlapor V. Serta adanya 2 (dua) Pelapor yakni Pelapor I dan Pelapor II yang identitasnya dirahasiakan oleh Majelis Hakim KPPU dalam putusan No. 07/KPPU-L/2004

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada pengkajian terhadap kaidah – kaidah atau norma – norma hukum yang terdapat dalam hukum positif maupun peraturan perundang - undangan. Pada umumnya, penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen dengan penggunaan data sekunder. Dalam penelitian ini akan dianalisa Putusan KPPU Nomor : 07/KPPU-L/2004, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST, Putusan Kasasi MA Nomor : 04 K/KPPU/2005, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 01.PK/PDT.SUS/2007 dalam konteks Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata kunci : *rule of reason*, persekongkolan tender, hukum persaingan usaha

## ABSTRACT

Name : Iqbal Albanna  
NPM : 0706305500  
Title of Tesis : THE APPLICATION OF “RULE OF REASON” APPROACH TO THE FORM OF BID RIGGING IN THE CASE OF SELLING 2 ( TWO ) UNITS OF VLCC TANKER SHIPS OF PT. PERTAMINA

In the context of business competition law, to analyze an activity done by a business person, the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) uses two approaches to determine whether that particular action is against the business competition law. These two approaches are *rule of reason* approach and *per se illegal* approach.

*Rule of reason* approach is an approach to evaluate reasons for a certain contract or business activity in order to determine whether that particular contract or activity hinders or supports competition. *Per se illegal* approach is an approach which states that a certain business contract or business activity as illegal without further corroboration upon the emerging impacts brought about by that business contract or activity.

*Bid rigging* is a practice conducted among bidders during the process of bidding to conduct a general work contract and other projects offered by the government, state-owned enterprises or private companies with cooperation by two or more business people in order to make a certain bidder win the bid.

The case of bid rigging in the selling of two units of *Very Large Crude Carrier* (VLCC) tanker ships owned by PT. Pertamina involved five prosecuted institutions. They are PT. Pertamina (Persero) as prosecuted I; Goldman Sachs, Pte. (Singapore) as prosecuted II; Frontline, Ltd. As prosecuted III; PT. Corfina Mitrakreasi as prosecuted IV; and PT. Perusahaan Pelayaran Equinox as prosecuted V. In addition, there were two prosecuting institutions known as prosecuting institution I and prosecuting institution II whose identity was kept secret by the Judicial Tribunal of KPPU in Judgment Number: 07/KPPU-L/2004

This research used normative judicial research method; that is legal research based on or referred to the examination of legal norms in positive law as well as in law and regulations. In general, normative judicial research is a document study using secondary data. This research analyzed the Judgment of KPPU Number: 07/KPPU-L/2004, the Judgment of the District Court of Central Jakarta Number: 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST, the Judgment of the Cassation Appeal of the Supreme Court Number: 04K/KPPU/2005, and the Judgment of the Judicial Review of the Supreme Court Number: 01.PK/PDT.SUS/2007 in the context of Law No. 5 year 1999.

Keywords: *rule of reason*, bid rigging, business competition law

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	20
1.3 Tujuan Penelitian .....	20
1.4 Kegunaan Penelitian .....	21
1.5 Kerangka Konseptual .....	22
1.6 Definisi Operasional .....	26
1.7 Metodologi Penelitian .....	29
1.8 Sistematika Penulisan .....	32
<b>2. TINJAUAN UMUM PERSEKONGKOLAN TENDER DAN PENDEKATAN HUKUMNYA .....</b>	<b>34</b>
2.1 Pengertian Tentang Persekongkolan Tender .....	34
2.1.1 Pengertian Umum Tentang Persekongkolan .....	34
2.1.2 Pengertian Umum Tentang Tender .....	37
2.1.3 Pengertian Umum Tentang Persekongkolan Tender ..	39
2.2 Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	41
2.3 Unsur-Unsur Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	49
2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Persekongkolan Tender .....	52
2.5 Indikasi Terjadinya Persekongkolan Tender .....	56
2.6 Modus Persekongkolan Tender .....	60
2.7 Para Pihak dan Cara Menentukan Adanya Persekongkolan .....	63
2.7.1 Para Pihak Dalam Persekongkolan .....	63
2.7.2 Cara Menentukan Adanya Persekongkolan .....	65
2.8 Dampak Negatif dan Upaya Menangani Persekongkolan Tender ..	66
2.8.1 Dampak Negatif Persekongkolan Tender .....	66
2.8.2 Upaya Menangani Persekongkolan Tender .....	70
2.9 Larangan Persekongkolan Tender dan Penerapan Sanksi Hukumnya .....	72
2.9.1 Larangan Persekongkolan Tender .....	72
2.9.2 Penerapan Sanksi Hukum Persekongkolan Tender .....	74

2.10 Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha .....	76
2.10.1 Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> .....	80
2.10.2 Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> .....	82
2.11 Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> Dalam Perkara Persekongkolan Tender .....	87
<b>3. PENEKAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KPPU DAN PENERAPAN PENDEKATAN "RULE OF REASON" DALAM PENJUALAN VLCC PT. PERTAMINA .....</b>	<b>91</b>
3.1 Dasar Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	91
3.2 Status, Keanggotaan dan Susunan Organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	94
3.2.1 Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	94
3.2.2 Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	95
3.2.3 Susunan Organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha ...	96
3.3 Tugas, Wewenang, dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	97
3.3.1 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	97
3.3.2 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	98
3.3.3 Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	99
3.4 Tata Cara Penanganan Perkara Hukum Persaingan Usaha .....	100
3.4.1 Pemeriksaan Pendahuluan .....	102
3.4.2 Pemeriksaan Lanjutan .....	106
3.4.3 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	109
3.4.4 Pengajuan Keberatan Oleh Pelaku Usaha .....	113
3.5 Posisi Kasus Persekongkolan Tender Penjualan 2 ( Dua ) Unit Kapal Tanker VLCC PT. Pertamina ( Persero ) .....	117
3.6 Putusan Dalam Perkara Penjualan 2 ( Dua ) Unit Kapal Tanker VLCC PT. Pertamina ( Persero ) .....	135
3.6.1 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KPPU- L/2004 .....	135
3.6.2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST .....	139
3.6.3 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04.K/KPPU/2005 .....	142
3.6.4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01.PK/PDT.SUS/2007 .....	147
3.7 Analisa Terhadap Putusan Dalam Perkara Penjualan 2 ( Dua ) Unit Kapal Tanker VLCC PT. Pertamina ( Persero ) .....	151
3.7.1 Analisa Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KPPU- L/2004 .....	151
3.7.2 Analisa Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST .....	162
3.7.3 Analisa Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04.K/KPPU/2005 ..	169

3.7.4 Analisa Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01.PK/PDT.SUS/2007 .....	177
<b>4. PENUTUP .....</b>	<b>186</b>
4.1 Kesimpulan .....	186
4.2 Saran .....	187
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>189</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>199</b>

